JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 30 Januari 2025 | **Revised:** 5 Februari 2025 | **Accepted:** 14 Februari 2025

Pengaruh Pendapatan Daerah Melalui Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan PDRB di Eks Karesidenan Madiun (2014-2023)

Erlina Anggun Febriyanti[1], Rochmat Aldy Purnomo[2], Yeni Cahyono[3], Slamet Santoso[4], Sayid Abas[5]
[1]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, erlinafebri18@gmail.com
[2]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, purnomo@umpo.ac.id
[3]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, cahyono@umpo.ac.id
[4]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, ssanto219@gmail.com
[5]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, abas.ump@gmail.com

Corresponding Author: erlinafebri18@gmail.com[1]

Abstract: *The success rate of a country or region is greatly influenced by economic growth. The purpose of this study is to investigate aspects of Regional Original Income (PAD) that can have an impact on Gross Regional Domestic Product (PDRB) through regional spending in Regencies/Cities throughout the Former Madiun Residency from 2014-2023. This research method uses a quantitative method with panel data from regional taxes, regional levies, regional government transfer funds, regional spending and PDRB. Data were obtained from the website of the Indonesian Ministry of Finance and also the Central Statistics Agency of the Regency/City of the Former Madiun Residency. The data analysis method uses eviews software with path analysis in analyzing it and the Sobel test in the final analysis. Regional taxes, regional levies, and TKD funds do not show an effect on PDRB through the Regional Netherlands as a mediating variable in Regencies/Cities in the Former Madiun Residency area. This study is expected to be a reference for local governments to allocate funds to be more targeted and specific, so as to be able to encourage an increase in PDRB.*

Keyword: *Regional Taxes, Regional Levies, TKD Funds, Regional Spending, Product Domestic Regional Bruto*

Abstrak: Tingkat keberhasilan suatu negara atau wilayah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian yaitu menginvestigasi aspek Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dapat berdampak pada Produk Domestik Regonal Bruto (PDRB) melalui belanja daerah pada Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Madiun dari Tahun 2014-2023. Metode penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan data panel dari pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer pemerintah daerah, belanja Daerah serta PDRB. Data diperoleh dari website Kementerian Keuangan RI dan juga Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Metode analisis data memakai software eviews dengan analisis jalur path dalam proses menganalisisnya yaitu dengan uji asumsi klasik, multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang selanjutnya menggunakan uji sobel pada analisis akhir dalam

menentukan pengaruh dan tidak pengaruhnya variabel mediasi / intervening. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, serta dana TKD tidak menunjukkan pengaruh pada PDRB melalui Belanja Daerah sebagai variabel mediasi di Kabupaten/Kota wilayah Eks Karesidenan Madiun. Penelitian ini harapannya jadi acuan pemerintah daerah mengevaluasi pengalokasian dana agar lebih tepat sasaran dan spesifik, sehingga mampu mendorong peningkatan PDRB.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana TKD, Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran yang memiliki peranan penting untuk mengetahui keberhasilan di suatu wilayah/daerah. Sebuah wilayah/daerah dianggap berhasil dalam melaksankan pembangunannya jika pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut cukup tinggi. Penelitian (Agustinus Maitulung, Anderson G. Kumenaung, 2023) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi oleh Masyarakat dan meningkatkan kemakmuran Masyarakat.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mengatur keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu Daerah. Salah satu aspek yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi adalah PAD. Dalam perolehan nilai PAD dipecah menjadi dua yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program Pembangunan seperti infrastruktur, Pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia sumber PAD meliputi pajak daerah dan retribusi daerah (Laodini et al., 2023). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dari individu (orang pribadi) atau badan usaha yang berada dalam wilayah administratif daerah. Di Indonesia aturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak daerah merupakan bentuk pengalihan Sebagian kekayaan masyarakat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi pada sektor public (Yeni, 2019).Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Masyarakat.

Menurut penelitian dari (Rizqy Ramadhan, 2019) retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu secara khusus disediakan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. ketentuan mengenai retribusi daerah telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Dana TKD atau istilahnya kita denga dana transfer ke Daerah, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah. Dana ini termasuk bagian dari belanja negara yang digunakan untuk mendanai berbagai macam program serta kegiatan ditingkat daerah. Terdapat tiga kategori / jenis dalam dana TKD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan

dan membelanjakan dan TKKD secara bijaksana dan tepat. Sebagian dari dana ini nantinya dari daerah akan dialokasikan kembali ke desa untuk mendukung Pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan antar wilayah (Keuangan, n.d.). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu daerah selama periode tertentu. PDRB berfungsi untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah atau daerah dan dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau harga berlaku (Liow et al., 2022).

Pajak serta retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu daerah, serta dianggap sebgai modal utama untuk melaksanakan Pembangunan daerah. Namu, perlu dicermati juga bahwa efektivitas penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui belanja daerah juga sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan dan alokasi anggaran oleh pemerintah daerah (Amrozi, 2016). Disisi lain pemerintah pusat memberikan Dana TKKD atau kita sebut dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dapat digunakan untuk memeratakan dan melaksanakan serta mendorong Pembangunan suatu daerah secara maksimal (Heliyanto & Handayani, 2016).

Penelitian dari (Azis, 2020), mengenai Pengaruh PAD melalui Belanja daerah pada Pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh terhadap belanja daerah bahwa setiap adanya peningkatan terhadap belanja daerah pada pemerintah akan diikuti dengan meningkatnya PAD serta PDRB dan begitu sebaliknya. Sedangkan (Hani Puspitasari & Mohammad Khusaini, 2023), dalam penelitiannya menegnai pertumbuhan PDRB dikawasan Gerbangkertosusila, mengatakan bahwasanya belanja daerah tidak memediasi antara pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB yang berlaku. Dimana hal ini merujuk pada Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun apakah belanja modal memediasi pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.

Tabel 1. Data PAD Kab/Kota Se Eks Karesidenan Madiun

Thn	Dalam satuan Milyar Rupiah					
	Kab. Ponorogo	Kota Madiun	Kab. Madiun	Kab. Magetan	Kab. Ngawi	Kab. Pacitan
2014	198.73	134.58	121.39	141.16	169.24	101.28
2015	210.70	164.68	149.63	321.60	191.17	126.45
2016	240.11	173.24	163.64	165.62	195.61	150.47
2017	308.23	230.61	241.94	212.81	275.72	202.09
2018	289.02	289.02	219.04	196.83	223.87	185.15
2019	290.82	252.05	229.21	237.38	255.08	199.04
2020	303.33	248.94	258.21	203.47	269.98	168.46
2021	376.70	265.92	333.15	243.73	283.61	211.69
2022	321.60	264.21	377.43	238.17	309.33	165.24
2023	231.08	255.55	323.79	233.23	306.91	213.21

Sumber: Website Dirjen Perimbangan Keuangan Menteri keuangan RI

PAD dan PDRB ialah indikator utama menilai level kemandirian wilayah atau daerah. PAD sering dijadikan sebagai alat evaluasi dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Berdasarkan data dalam Tabel 1, selama periode sepuluh tahun terakhir (2014-2023), PAD Kabupaten/Kota di wilayah Eks Karesidenan Madiun menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tren peningkatan nilai PAD belum menunjukkan kestabilan dalam peningkatannya, bahkan hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan nilai PAD pada tahun 2023 (Lbn Raja & Hasugian, 2018).

Wilayah Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun dapat dijadikan contoh untuk menilai sejauh mana naiknya PAD dan Belanja Daerah mampu menjadi indikator

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB suatu daerah (Liow et al., 2022). Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini masih tergolong belum optimal. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai PAD dan Belanja Daerah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan target realisasinya. Salah satu permasalahan utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi yakni ketidakmampuan pemda Kabupaten/Kota dalam memastikan pemerataan alokasi dana di wilayah masing-masing (Bancin & Hasibuan, 2023). Permasalahan yang sering terjadi karena daerah atau wilayah seperti pada Provinsi Jawa Timur belum mampu atau bisa maksimal dalam mengelola potensi Sumber daya yang ada diwilayah tersebut, yang berakibat nilai PAD dan PDRB di wilayah/daerah tersebut belum dapat melampaui target realisasinya (Susanti & Aji, 2021).

Dari fenomena permasalahan tersebut maka pemerintah daerah perlu membuat sebuah kebijakan yang baru atau strategi yang baru guna menaikkan nilai pertumbuhan ekonomi sebuah daerah (Saragih, 2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan menjadi tolak ukur bahwa daerah tersebut dapat dikatan mandiri dan maju. PDRB yakni indikator utama kinerja ekonomi daerah yang mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dari banyak sektor, industri, pertanian, perdagangan, serta jasa (Arfah, 2022).

Dengan demikian, perlu dianalisis mengenai korelasi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta meningkatnya Belanja Daerah yang bersumber dari PAD di Kabupaten/Kota wilayah Eks Karesidenan Madiun dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai PDRB di wilayah tersebut. Pemerintah daerah pada dasarnya berharap bahwa peningkatan Belanja Daerah dapat mendukung sektor-sektor ekonomi strategis, memperkuat investasi di bidang infrastruktur, dan menaikkan kualitas layanna publik, yang akhirnya harapannya mendorong tumbuhnya ekonomi melalui peningkatan nilai PDRB di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.

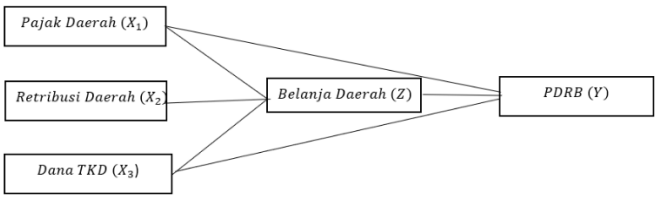
METODE

Metode penelitian yang dipakai yakni kuantitatif, metode penelitian melibatkan pengumpulan daan analisis data berbasis anga serta menggunakan pengukuran secara numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguji data yang diperoleh. Penelitian kuantitatif dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkiat suatu fenomena penelitiann melalui pengumpulan data uji hipotesis serta menjawab pertanyaan penelitian secara terukut lewat bantuan metode statisika dan matematika (Ardiansyah et al., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yakni metode untuk analisa data berdasarkan angka dan pengukuran numerik. Di penelitian ini data sekunder dipakai dalam data panel (Hani Puspitasari, Mohammad Khusaini, 2023). Penelitian ini diadakan di wilayah pemda Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Madiun. Dimana terdapat 6 wilayah meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota Madya. Wilayah ini dipilih karena termasuk dalam kategori wilayah yang dimana terdapat satu wilayah yang begitu dominan dalam hal percepatan pertumbuhan ekonominya dari pada wilayah lain yang masih selingkup. Periode waktu penelitian ini menggunakan obyek penelitian dari tahun 2014 hingga 2024.

Populasi serta sample penelitian ini mencakup Kabupaten/Kota di wilayah Eks-Karesidenan Madiun, dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2014-2023. Sampel penelitian ini meliputi data laporan APBD serta data statistic pada periode. Data dianalisis meliputi PAD, mencangkup pajak serta retribusi daerah, Dana TKD, Belanja Daerah, serta nilai PDRB. Sumber data dari website Kementerian keuangan (DPJK), BPS, artikel dan jurnal literatur lainnya yang relevan. Penelitian ini memakai jenis penelitian kuantitatif deskriptif dimana data menggunakan data panel dari data APBD dan data BPS terkait serta jurnal atau artikel terkait penelitian ini. Data dipakai yaitu data nilai pajak daerah, reribusi daerah, dana TKD, belanja daerah, dan juga PDRB. Selanjutnya hasil perolehan data panel akan diolah

dengan jalur path analysis yang diuji menggunakan model regresi berganda dan uji sobel melalui software eviews.

Jenis data diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data sekunder. Dimana data yang diperoleh dari dana APBD dan pertumbuhan ekonomi. Data dipeoleh dari website resmi Kementerian Keuangan (DPJK) dan Badan Pusat Statistika (BPS). Data yang dipakai yakni data Dana PAD yakni pajak serta retribusi daerah, dana TKD, belanja Daerah, dan PDRB dari tahun 2014-2023. Di penelitian ini Teknik analisis data memakai Teknik analisis data jalur path analiysis diuji menggunakan model regresi linear berganda lewat software eviews. Namun sebelum uji regresi linear berganda data panel lebih dulu uji stasioner, Dimana uji stasioner ini untuk mencari tahu model data panel yang dipakai di uji regresi linear berganda. Di uji stasioner ini memakai uji chow, uji hausman, serta uji langrange multiplier dengan nilai probabilitas < 5% serta > 5%. Selanjutnya setelah mendapat hasil pemilihan model paling baik dari uji structural 1 dan 2 maka diadakan uji asumsi klasik, uji multikolinearitas serta uji hetero-skedastisitas guna mencri tahu apakah model structural yang digunakan valid dan hasil yang diperoleh akurat. Hasil pemilihan model regresi terbaik yang telah diuji akan membentuk dua persamaan regresi yang terdiri dari model persamaan 1 serta 2 yang diperoleh dari kerangka berfikir.



Gambar 1. kerangka Berfikir

Model persamaan 1:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Model persamaan 2:

$$\gamma = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + e$$

Keterangan:
γ = PDRB
X_1 = Pajak Daerah
X_2 = Retribusi Daerah
X_3 = Dana TKD
Z = Belanja Daerah
a = Konstanta
β = Koefisien Regresi
e = Error Term / galat

Dua model persamaan regresi tersebut bisa dibentuk model analisis persamaan seperti Gambar 1. Selanjutnya uji hipotesis, diperlukan uji t dan uji sobel. Dimana menurut (Hani Puspitasari & Mohammad Khusaini, 2023) uji hipotesis menggunakan uji t jika probabilitas ≤ 0.05 hipotesis diterima. Begitu pula dengan jika nilai probabilitas > 0.05 maka hipotesis ditolak. Uji sobel dilakukan guna mencari tahu tingkat pengaruh langsung serta tak langsung anatara variabel X dan γ melalui variabel Z disebut variabel mediasi atau intervening. Uji ini dilakukan mencari tahu tingkat pengaruh langsung serta tak langsung anatara variabel X dan γ melalui variabel Z yang disebut sebagai variabel mediasi atau intervening.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis uji regresi pada data panel, lebih dulu dijalankan uji stasioner guna mengetahui model apa dalam model persamaan 1 dan 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Pemilihan Model

Nama Uji	Pers. Model 1	Pers. Model 2	Model terpilih
Uji Chow	o.0001	0.0007	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0.0000	0.0004	Fixed Effect Model
Uji LM	0.4373	0.9783	Common Effect Model
Nilai Probabilitas sebesar >0.05 dan <0.05			

Dari hasil pegujian pemilihan model dengan uji stasioner melalui uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier model terbaik persamaan 1 dan 2. Berdasarkan pada tabel 2 maka dapat didapat uji chouw bagi persamaan regresi 1 menghasilkan nilai cross section chi -square 0.0001 < 0.05, diperoleh model FEM terpilih. Selanjutnya melalui uji hausman menghasilkan nilai cross section chi -square 0.0000 < 0.05, model terpilih yaitu model FEM. Sedangkan pada uji penentu terakhir model persamaan 1 menghasilkan nilai cross section chi -square 0.4373 > 0.05, terpilih model common effect model (CEM).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas untuk Model Persamaan 1

	X1	X2	X3
X1	1	-0.314...	0.227...
X2	-0.314...	1	-0.289...
X3	0.227...	-0.289...	1

Selanjutnya setelah melakukan pemilihan model terbaik dari persamaan 1 dan 2, selanjutnya dari model terpilih tersebut dengan uji asumsi klasik yakni uji multikolinearitas serta uji heteroskedastisitas. Pada uji multikolinearitas bisa dilihat apakah model persamaan 1 terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas. Hasil persamaan dikatan bebas dari uji multikolinearitas apabila variabel bebas bernilai koefisien korelasi tidak lebih dari < 0.08. Berdasarkan hasil pengujian untuk model persamaan 1 bisa diketahui di tabel 3 bahwasannya nilai variabel bebas tidak ada yang melebihi nilai koefisien korelasi, maka untuk model persamaan 1 bisa dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas untuk Model Persamaan 2

	X1	X2	X3	Z
X1	1	-0.314	0.227	0.302
X2	-0.314	1	-0.289	-0.311
X3	0.227	-0.289	1	0.958
Z	0.302	-0.311	0.958	1

Pada uji multikolinearitas untuk Model persamaan 2 pada tabel 4 diketahui model persamaan 2 tidak adanya variabel bebas yang nilai koefisien korelasinya melebihi < 0.08. Maka untuk model persamaan 2 bisa dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas untuk Model Persamaan 1 & 2

Variabel	Sig.	Pob. Per. 1	Prob. Pers. 2
X1	0.05	0.3205	0.7532

X2	0.05	0.9761	0.6527
X3	0.05	0.5292	0.3371
Z	0.05	-	0.1476

Selanjutnya uji heteroskedastisitas dimana uji ini hasil dari model persamaan 1 dan 2, jika nilai probabilitas variabel antara persamaan 1 serta 2 lebih dari nilai signifikansi 0.05, maka variabel di persamaan 1 serta 2 dikatakan bebas dari uji heteroskedastisitas. Dari uji heteroskedastisitas tabel 5 diketahui nilai probabilitas variabel > dari 0.05 model persamaan 1 dan 2 dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Rergresi uji t,uji F dan Uji R Square Model Persamaan 1

	Koef	Std. Error	T Satistic	R Square	Prob
C	261.6	91.86	2.84	0.92	0.006
X1	1.38	0.62	2.20	0.92	0.031
X2	-0.89	2.38	-0.37	0.92	0.710
X3	1.08	0.04	24.49	0.92	0.000

Tabel 7. Hasil Rergresi uji t,uji F dan Uji R Square Model Persamaan 2

	Koef	Std. Error	T Satistic	R Squar	Prob
C	1074.4	2119.3	0.50	0.67	0.614
X1	74.33	14.08	5.27	0.67	0.000
X2	72.56	51.58	1.40	0.67	0.165
X3	8.04	3.27	2.45	0.67	0.017
Z	-0.55	2.88	-0.19	0.67	0.847

Selanjutnya pada pengujian hipotesis melalui regresi pada uji t dari tabel 6 dapat pajak daerah memberi pengaruh positif pada belanja daerah bernilai 1.38 probabilitas 0.031 < 0.05, retribusi daerah memberi pengaruh tidak positif tak signifikan pada belanja daerah dengan nilai -0.89 probabilitas 0.710 > 0.05, sedangkan dana TKKD memberi pengaruh positif pada belanja daerah bernilai 1.08 probabilitas 0.000 < 0.05. Sedangkan dengan uji F (pengaruh secara simultan) model persamaan 1 diketahui bahwa nilai probabilitas X1, X2, X3 yaitu sebesar 9.10 > 0.05, maka artinya variabel X1, X2, dan X3, dan pada uji R(square) dijelaskan bahwa variabel X1, X2, X3 (paja daerah, retribusi daerah, dana TKD) mampu menjelaskan variabel Z (Belanja Daerah) sebesar 19% dengan 81% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

Sedangkan pengujian hipotesis melalui regresi untuk model persamaan 2 dapat dilihat pada Tabel 7 dimana, pajak daerah memberi pengaruh positif pada PDRB dengan nilai 74.33 dan nilai probabilitas 0.000 < 0.05, retribusi daerah tidak memberi pengaruh pada PDRB dengan nilai 72.56 dan nilai probabilitas 0.165 > 0.05, dana TKD memberi pengaruh pada PDRB dengan nilai 8.04 dan nilai porbabilitas 0.017 < 0.05, dan Belanja Daerah tak memberi pengaruh pada PDRB dengan nilai -0.55 dan nilai probabilitas sebesar 0.84 > 0.05. Untuk uji F (Pengaruh secara simultan) dan uji R (square) diketahui nilai Probabilitas variabel X1, X2, X3, Z (pajak daerah, retribusi daerah, dana TKD, belanja daerah) punya pengaruh pada variabel Y (PDRB), dengan menguraikan variabel X1, X2, X3, Z 16% dengan sisamya sejumlah 84% dijelaskan oleh variabel lain.

Kemudian pada uji hipotesis terakhir dengan uji sobel, dimana pada uji sobel ini dipakai mencari tahu pengaruh tak langsung antar variabel X dan Y lewat variabel Z sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Dari hasil pengujian terhadap variabel X pada variabel Y lewat variabel Z diperoleh hasil sebagaimana ada pada tabel 7.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji Sobel

Variabel	t Hitung	t Tabel	Df
X1 terhadap Y melalui Z	0.18	1.67	57
X2 terhadap Y melalui Z	0.17	1.67	57
X3 terhadap Y melalui Z	0.19	1.67	57

Dari tabel diatas nilai t hitung variabel pajak retribusi daerah, serta dana TKKD tidak memberi pengaruh PDRB lewat belanja Daerah yang jadi variabel mediasi.

Hasil penelitian memperlihatan pajak daerah punya pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Sementara itu, retribusi daerah tak memberikan pengaruh positif pada tumbuhnya ekonomi, sedangkan dana TKD dengan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa pajak daerah punya peran penting dan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini selaras dengan penelitian (Dewi & Budhi, 2013) yang juga mengatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi belanja daerah masih belum cukup memberi pengaruh signifikan untuk menjadi variabel mediasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu pemerintah daerah Kabupaten / Kota Kawasan Eks Karesidenan Madiun dapat kita lihat bahwasannya pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana Dana TKD masih menjadi peran pendukung dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila pemerintah tersebut sudah bisa menggunakan hasil dari pendapatan daerahnya untuk belanja daerah yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja daerah yakni komponen penting dalam pengelolaan keuangan publik menaikkan kesejahteraan masyarakat serta menyokong pembangunan daerah. Namun, pada dasarnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai mediasi pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana TKD pada peningkatan PDRB di wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Hal ini selaras dengan penelitian (Hani Puspitasari & Mohammad Khusaini, 2023), yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak memediasi hubungan pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana TKD pada peningkatan PDRB di kawasan Gerbangkertosusila. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum spesifik dan optimal, hingga belanja daerah belum berfungsi secara efektif sebagai faktor mediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.

KESIMPULAN

Hasil analisis data memperlihatkan pajak daerah memiliki pengaruh pada PDRB. Jika pajak daerah dikelola secara optimal untuk membiayai pengeluaran daerah yang bersifat produktif, hal tersebut berpotensi mendorong peningkatan nilai PDRB. Namun, retribusi daerah belum berpengaruh signifikan pada PDRB, karena jumlah pendapatan retribusi daerah relatif lebih rendah dibandingkan pajak daerah, dan alokasinya masih kurang spesifik untuk

memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Di sisi lain, Dana TKD terbukti berpengaruh pada tumbuhnya PDRB di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.

Selain itu, pajak daerah, retribusi daerah, Dana TKD tak memberi pengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Kawasan Eks Karesidenan madiun. Hal ini terjadi karena, dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dana TKD pemerintah daerah Kabupaten/Kota di kawasan Eks Karesidenan Madiun masih belum bisa mengoptimalkan dana tersebut terhadap pembiayaan belanja daerah. Dimana dana tersebut masih diperuntukkan untuk mengisi kas daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah serta dana TKD tidak punya pengaruh pada meningkatnya produk domestik regional bruto lewat belanja daerah. Alokasi PAD belum spesifik serta belum optimal dalam pengalokasian terhadap belanja daerah. Sehingga belanja daerah tidak menjadi mediasi antara pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto.

Pada dasarnya pengalokasian pajak daerah, retribusi daerah dan dana TKD sebagian besar masih belum dialokasikan pada belanja Kabupaten / Kota kawasan Eks Karesidenan Madiun. Sehingga belanja daerah belum bisa menjadi mediasi antara pajak daerah, retribusi daerah, dan dana TKD dalam mempercepat pertumbuhan produk domestik regional bruto dan juga pertumbuhan ekonomi. Dari kemandiriannya pemerintah Kabupaten / Kota di Kawasan Eks Karesidenan Madiun punya ketergantungan besar pada dana TKD atau terhadap pemerintah pusat. Maka, hal ini perlu dijadikan sebuah pedoman terhadap evaluasi dalam hal pengalokasian pendapatan daerah terhadap belanja modal dan juga upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kawasan Kabupaten / Kota se Eks Karesidenan Madiun.

REFERENSI

Agustinus Maitulung, Anderson G. Kumenaung, A. T. N. (2023). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. *23*(7), 145–156.

Amrozi, A. I. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 12. https://doi.org/10.30736/jpensi.v1i1.9

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Arfah. (2022). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, *1*(3), 419–438.

Azis, M. I. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, *18*(2), 122–129.

Bancin, D. S. N. B., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *1*(4), 181–196. https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/78

Dewi, N. W. N., & Budhi, M. K. S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Langsung Di Provinsi Bali. *Ekonomi Pembangunan*, *4*(11), 1391–1420.

Hani Puspitasari, Mohammad Khusaini, F. W. P. (2023). Analisis Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal Kawasan Gerbangkertosusila. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *8*(2), 171–187. https://doi.org/10.33105/itrev.v8i2.487

Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi :*, *5*(3), 1–17.

Keuangan, K. (n.d.). *Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Postur APBD*.

Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(6), 217–228. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/49639

Lbn Raja, T. H., & Hasugian, P. R. T. (2018). Influence Product Domestic Regional Bruto (PDRB), Total Population, And Capital Expenditures On Pad (Regional Generated Revenue) (A Case Study In District And Towns In North Sumatera Province). *Advances in Social Sciences Research Journal*, *5*(1), 185–196. https://doi.org/10.14738/assrj.52.4116

Liow, maria omega, Naukoko, A., & Wensy, R. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(2), 140.

Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, *5*(1), 81–87. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455

Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *3*(1), 17. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103

Susanti, D., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Independent: Journal of Economics*, *1*(1), 68–84. https://doi.org/10.26740/independent.v1n1.p68-84

Yeni, F. (2019). *Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Siak Tahun 2006-2016*. 102. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6004